



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, Kamis 05 Oktober 2023



RINGKASAN BERITA HARI INI



DITERIMA KOMISI A, PERSOALAN TANAH WARGA PRANTI TUNTAS

Sidoarjo, Pojok Kiri
Komisi A DPRD Sidoarjo, Selasa (3/10) menerima rombongan aksi warga Pranti Kecamatan Sedati yang meminta penyelesaian pengurusan sertifikat tanah yang sudah sejak tahun 2015 belum juga tuntas.

Dalam hear ring yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudhori, hadir Kades Pranti Eko Purnomo, Camat Sedati Dardak, pihak BPN Sidoarjo, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mulyawan serta instansi terkait.

Menurut Kades Eko Purnomo sekitar tahun 2015 ratusan warga Desa Pranti mengajukan permohonan sertifikat tanah secara swadaya total 423 pemohon, namun sekitar tahun 2021 baru sekitar 198 selesai sedang 225 belum selesai, sementara yang 95 pemohon sudah keluar rekomendasi model A.

"Artinya berkas mereka sudah selesai pengukuran



dan peta bidang, tinggal dikeluarkan sertifikat tanahnya," katanya saat hearing. Namun, yang jadi pertanyaan publik tidak terkendala pergantian pejabat, bila kalau begini lantaskapan jadinya pengurusan sertifikat tanah warga, masak ganti pejabat harus diurus ulang,"

lantaran pejabat BPN Sidoarjo yang menangani sudah pindah. "Sebagai lembaga negara mestinya sistem pelayanan publik tidak terkendala pergantian pejabat, bila kalau begini lantaskapan jadinya pengurusan sertifikat tanah warga, masak ganti pejabat harus diurus ulang,"

katanya. Mendapat pengakuan Kades Pranti tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudhori lantas meminta perwakilan BPN Sidoarjo untuk menjawab. Firi Hariyadi dan Jayeng dari BPN Sidoarjo yang mengaku baru pindah ke

Sidoarjo kaget dan langsung meminta Kades Pranti dan perwakilan warga untuk datang ke ruangannya guna menyelesaikan sertifikat tanah tersebut.

"Kami akan beri perlakuan khusus untuk warga Pranti agar sertifikat tanah cepat selesai," tegas Jayeng.

Ketua Komisi A dan kades Pranti yang mendengar pernyataan BPN langsung lega karena persoalan yang dikeluhkan warga Pranti sudah ada solusinya.

Ketua Komisi A bersama H.Haris wakil ketua komisi A dan H.Samsul Hadi anggota, kemudian menemui ratusan warga Desa Pranti yang menunggu di luar untuk menyampaikan kabar gembira tersebut.

"Kami senang bisa memfasilitasi keluhan warga dan langsung direpson oleh pihak terkait sehingga persoalan sertifikat tanah warga bisa cepat tuntas," tegas H.Haris wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo. (Nang)

Komisi A Panggil BPN Terkait Sertifikat Tanah 8 Tahun Tidak Selesai

Sidoarjo, Bhirawa
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dhamroni Chudhori, minta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, supaya ada solusi secepatnya, terkait kasus pengurusan sertifikat tanah di desa Pranti, Kecamatan Sedati yang bertahun-tahun tidak ada kepastian. Sebagaimana diketahui, Selasa (3/10),

kemarin, Komisi A DPRD Sidoarjo telah memimpin rapat hearing, diantaranya diikuti oleh BPN Sidoarjo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Camat Sedati, Pemerintah Desa Pranti, BPD dan perwakilan warga Desa Sedati. Disampaikan oleh Kepala desa (Kades) Pranti, Eko Purnomo, sampai saat ini masih ada 225 pemohon belum bisa diselesaikan sertifikat tanah massal dari BPN Sidoarjo.

Awalnya pada tahun 2015, ada 423 warga ikut pengurusan sertifikat tanah secara massal di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sidoarjo. Setelah berjalan 6 tahun, yakni pada 2021 lalu, yang sudah selesai ada 198 pemohon. "225 pemohon belum selesai hingga kini," kata Eko. Namun demikian, dari jumlah itu ada 95 pemohon yang sudah terbit model A dari BPN.

Pasca menjabat Kades, Eko mengaku dirinya juga terus berkomunikasi dengan pihak BPN agar melanjutkan proses pengurusan. Namun berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak BPN, pengurusan tidak bisa dilanjutkan. lantaran petugas yang menangani sudah pindah tugas. Sehingga kalau mau dilanjut, harus memulainya dari awal. (kus.dre)

Progres Perbaikan 38 Sekolah Rusak Capai 70 Persen

SIDOARJO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo tahun ini memperbaiki 38 sekolah yang rusak. Baik TK, SD, maupun SMP. Jika dirata-rata, progres perbaikan puluhan sekolah tersebut saat ini sudah mencapai 70 persen. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana-Prasarana Dinas Dikbud Sidoarjo Heri Purwanto menyatakan bahwa perbaikan dimulai pada Juni lalu. "Namun, ada juga yang Agustus, bahkan September. Tapi, kalau dirata-rata, sudah 70 persen progres keseluruhannya," katanya kemarin (4/10). Namun, ada yang sudah hampir selesai seperti SDN Tambak Sawah, Waru. Di sekolah tersebut, pengecatan sudah tuntas. Tinggal finishing. Namun, ada pula yang masih menyelesaikan struktur bangunan seperti di SDN Waru 2. "Masa mulainya memang berbeda, tapi targetnya sama, yakni akhir tahun seluruhnya tuntas," tegasnya. Di tengah perbaikan sekolah itu, kemarin Dikbud Sidoarjo mengumpulkan operator dari seluruh SMPN di Sidoarjo. Mereka dikumpulkan dan dilatih menggunakan aplikasi baru untuk mengidentifikasi kerusakan di setiap sekolah. "Lewat aplikasi tersebut, pihak sekolah bisa melaporkan jenis kerusakannya," ungkapnya. Pelaporan lewat aplikasi ini dilengkapi foto, pertunjukan kondisi kerusakan,



RUSAK BERAT: Pekerja memperbaiki salah satu kelas SDN Waru 2 yang rusak kemarin (4/10). Pengerjaan diperkirakan tuntas Desember.

dan alamat sekolah. Setelah pelaporan, sistem akan menghitung kerusakan kelas tersebut. "Sistem dalam aplikasi secara otomatis mengidentifikasi bahwa ruang tersebut rusak sangat berat, berat, sedang, atau ringan sekaligus ada perkiraan kebutuhan anggaran perbaikannya," terangnya. Dengan adanya aplikasi tersebut, data yang terinput bisa lebih cepat.

Petugas tidak perlu datang ke satu per satu sekolah. "Dari data pelaporan yang masuk, muncul sekolah mana saja yang prioritas untuk diperbaiki segera dan yang mana yang bisa ditunda sementara," jelasnya. Data dari identifikasi aplikasi itu menjadi salah satu dasar pengalokasian anggaran perbaikan sekolah sesuai dengan kondisi riil. Pengem-

bang aplikasi tersebut, Abdul Ghofur, menyatakan bahwa laporan identifikasi itu terakam. "Ada historinya. Karena itu, sekolah diminta melaporkan rutin," katanya. Minimal satu kali pelaporan dalam satu semester. Tujuannya, memudahkannya dalam mengetahui kondisi ter-update di sekolah. "Jadi, tiap waktu ada update-nya," ujarnya. (uzi/c14/ai)



ZAMAN BELANDA: Salah satu bangunan lawas di Dusun Kauman, Kedungcangkring, Jabon, kemarin (4/10).

Desa Kedungcangkring, Jadi Sentra Batik di Bangunan Era Belanda

SIDOARJO - Masuk ke Dusun Kauman, Kedungcangkring, Jabon, terlihat banyak sekali bangunan tua era kolonial Belanda. Bahkan, beberapa ada yang tampak tidak terawat. Namun, ada juga yang digunakan menjadi tempat tinggal. Menurut pegiat sejarah Sidoarjo Setyo Santoso, Dusun Kauman, Kedungcangkring, dulunya wilayah industri kain batik. Dan, salah satu dari rumah lawas tersebut milik pengusaha batik pada masa itu. "Kedungcangkring memang sejak lama terkenal dengan batiknya," ungkapnya. Setyo mengungkapkan, dari sekian banyak rumah lawas di kawasan Dusun Kauman, Kedungcangkring, ada salah satu yang paling tua. "Ada ukiran huruf Arab dan dibaca tahunnya 1913," jelasnya. (eza/c17/ai)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pimpinan dan Anggota
DPRD KABUPATEN SIDOARJO
Mengucapkan
DIRGAHAYU
TNI REPUBLIK INDONESIA
8 OKTOBER 2023
**TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi
untuk Indonesia Maju**

H. Usman M. Kes
Ketua

Bambang Riyoko, SE
Wakil Ketua

Kayan, SH
Wakil Ketua

Dr. Emir Firdaus, ST/MM
Wakil Ketua

RADAR
SIDOARJO.ID

Silpa 2023 Diperkirakan Meningkatkan Jadi Rp 492 Miliar

KOTA-Angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2023 diperkirakan mencapai sekitar Rp 492 miliar. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso.

Dia menyebut, angka itu mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan Silpa APBD tahun sebelumnya. Yaitu sebesar Rp 450 miliar pada 2022.

Bangun menjelaskan, silpa tahun ini berasal dari beberapa pos anggaran. Antara lain be-

lanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal. "Yang diperkirakan tidak dapat terserap sepenuhnya hingga akhir tahun," ujarnya.

Meski begitu, dia berharap hingga akhir tahun nanti serapan anggaran bisa dimaksimalkan. Dia pun meminta seluruh pelaksana OPD untuk menggunakan anggaran dengan baik sehingga tidak ada Silpa.

OPD juga diminta mengevaluasi kembali penganggarannya

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Silpa 2023 Diperkirakan...

dengan menunda penganggaran kegiatan yang tidak prioritas untuk dilaksanakan tahun ini. Di samping itu, dirinya juga mengharapkan kepada

perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan pendapatan daerah agar lebih mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatannya.

Sebelumnya, pada penetapan APBD 2023, tercatat pendapatan daerah me-

ningkat sebesar Rp 59,1 miliar. Sehingga totalnya menjad Rp 4,8 triliun.

Sementara itu, belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp 103,9 miliar, sehingga nilainya mencapai Rp 5,3 triliun. **(nis/vga)**



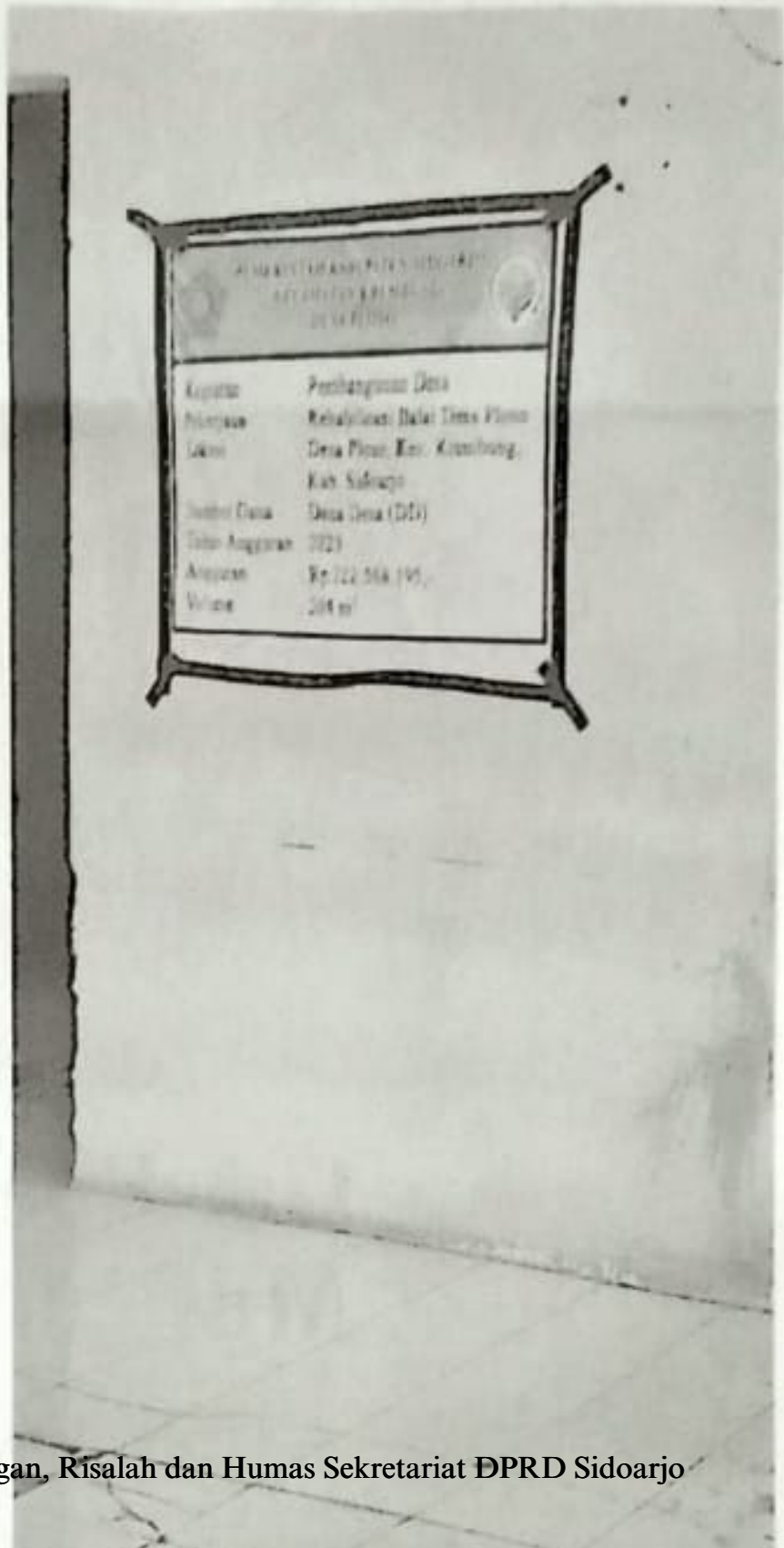
TELAN RATUSAN JUTA REHAB BALAI DESA PLOSO, DIDUGA TERINDIKASI KORUPSI

Sidoarjo, Pojok Kiri

Pemerintah pusat melalui Dana Desa telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Upaya tersebut dengan dikeluarkannya undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Selain itu didalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang azas pengelolaan keuangan Desa telah diatur Dana Desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib administrasi anggaran. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan ada banyak pelanggaran dan penyimpangan.

Hal ini diungkapkan Solik Lembaga Swadaya Masyarakat di bawah bendera Aliansi Masyarakat Perangi Korupsi (AMPK) pada wartawan, Selasa 4/10/23, ia menyebutkan Indikasi telah terjadi dugaan korupsi Dana Desa di Desa Ploso Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Dia katakan lebih lanjut akan Puldata dan Pukbaket dan jika nanti terbukti ada dua alat bukti yang mendukung praktek tindak pidana korupsi, ia akan melaporkan secara resmi dan ke Kejaksaan maupun ke Polresta Sidoarjo, Tanggung Sementara pola yang



asnya. Sementara pada yang dilakukan dengan beberapa modus seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai juknis, Mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam penetapan APBDes, diduga bukan hasil Musdes, membuat rancangan anggaran biaya diatas harga pasar, ketiga mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan Dana Desa serta kejanggalan lainnya.

Tak hanya itu pihak Desa dalam hal ini oknum kepala Desa selaku yang paling bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran DD diduga tidak melibatkan masyarakat Desa dalam penetapan APBDes. Padahal dalam realisasi sebenarnya masyarakat berhak menentukan secara mandiri penggunaan DD sesuai dengan musyawarah Desa (Musdes) sebagaimana diatur di Undang undang nomor 6 tahun 2014, Tegas, Solik yang kesehariannya juga berprofesi sebagai wartawan ini.

Ditambahkan Solik dari beberapa informasi yang masuk serta temuan awak media Pojok Kiri di Desa Ploso ditemukan dugaan penyelewengan seperti kegiatan pembangunan rehabilitasi Kantor balai Desa dengan anggaran



Rp.222,568,195 juta diduga menyalahi aturan penggunaan dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa. Mengingat sejak bergulirnya Dana Desa ada beberapa item infrastruktur yang tidak boleh dibangun dengan menggunakan Dana Desa seperti sarana ibadah, Gapura batas Desa dan juga kantor kepala Desa, terangnya

Hal ini tidak sesuai dengan Permendes nomor 21 tahun 2015 tentang petunjuk pembangunan Infrastruktur yang menyebutkan prioritas penggunaan Dana Desa bidang infrastruktur antara lain jalan, irigasi, jembatan juga bidang lainnya.

Pelarangan tersebut juga diperkuat dengan permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Disana disebutkan prioritas penggunaan Dana Desa harus mengutamakan pada kegiatan padat karya tunai Desa, pemenuhan kebutuhan dasar serta penanggulangan kemiskinan sebagai dampak sosial lainnya.

Dugaan lain yang juga terjadi pada beberapa kegiatan pembangunan bidang infrastruktur yang tidak jelas waktu pelaksanaannya dan diduga diborongkan, yang tidak dilaksanakan secara swakelola.

Kepala Desa Ploso, Susilo Budiyanto ketika akan dikonfirmasi terkait adanya rehabilitasi kantor Desa tersebut, Selasa (3/10/2023) tidak berhasil ditemui. Sudah beberapa kali awak media ingin menemui dikantornya tetapi tidak pernah berhasil, awak media mencoba menghubungi dirinya melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon namun sampai berita ini ditayangkan belum juga ada tanggapan. Melalui Sekretaris Desa M. Mas'ud menyarankan menghubungi Pak Kades saja soalnya disarankan untuk konfirmasi mengenai rehab kantor Desa satu pintu. Sampai berita ini terbit kades Susilo melalui pesan WhatsApp menjawab maaf mas kemarin saya ijin Sakit. (Tim/Bersambung)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



Proyek Pembangunan Saluran Irigasi di Desa Kepadangan

Bermanfaat untuk Petani

Sidoarjo, Pojok Kiri

Pembangunan peningkatan irigasi permukaan di Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan dinilai akan sangat bermanfaat bagi para petani setempat untuk pengelolaan dan pengaturan air.

Pembangunan yang dikelola oleh Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Hippa Rukun tersebut saat ini sudah rampung.

Pelaksana lapangan P3A Rukun Tani, M.Bisri mengatakan proyek tersebut dianggarkan dari APBN Tahun 2023 sebesar 195 juta melalui Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan oleh P3A Hippa Rukun Tani disesuaikan dengan peraturan agar maksimal sehingga kualitas bangunannya bisa bertahan lama.

“Kami mengikuti apa yang diinstruksikan oleh para pendamping pembangunan dari Dirjen Balai Besar . Terang Bisri,” Senin (2/10/23).

Kepala Desa Kepadangan, Samsul Anam menegaskan, pihaknya mendukung pembangunan proyek saluran air tersebut karena besar manfaatnya untuk para petani di desanya.

Lebih lanjut kades Anam menambahkan, Proyek tersebut tidak semata-mata datang dengan sendirinya tanpa melalui proses. “Saya pastikan proyek pembangunan Saluran irigasi dari Dirjen Sumber Daya Air , Prop.Jawa Timur melalui Balai Besar Sungai Brantas itu telah diketahui Pemdес dan diawasi oleh pendamping Balai Besar,” tegasnya. (dy/khol)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Penguatan Ketahanan Pangan Pemdes Klurak Lakukan Pemeliharaan Irigasi Tersier

Sidoarjo, Pojok Kiri

Program Prioritas Nasional penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Untuk pemulihan Ekonomi Sesuai Kewenangan Desa di antaranya penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, yang terdiri dari Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa, seperti Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung antara lain akses jalan pertanian, tembok penahan tanah, jaringan air dan Sebagainya.

Oleh Karenanya Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2023 pemerintah Desa Klurak Kecamatan Candi sesuai dengan rencana Kerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bergerak di sektor Pertanian ialah melaksanakan pemeliharaan Jaringan irigasi Tersier, dengan tujuan penguwatan kawasan centra produksi pangan sesuai dengan potensi Desa.

H. Siswoko selaku kepala Desa menjelaskan” Sesuai dengan peraturan menteri Desa dan juga sesuai dengan penetapan APBDes tahun 2023 yang masuk di dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat diantaranya yaitu kita melakukan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier” Katanya rabu (5/10).

“Pemeliharaan Jaringan Irigasi tersebut tentunya dapat apresiasi Dari masyarakat khususnya para kelompok tani karena sebelumnya jaringan Irigasi tersebut bangunannya banyak yang rusak, sehingga penangkapan air yang Mengalir Ke Sawah Kurang Maksimal, oleh karena itu kita lakukan pemeliharaan, karena di saat musim hujan Irigasi tersebut tidak muat menampung air yang berlebih” Tambahnya.

“Sesuai dengan rencana kerja kita di tahun 2023, dengan potensi Desa melalui pendapatan tranfer dari APBN berupa Dana Desa yang kita Terima kita gunakan untuk program Ketahanan Pangan dan Hewani termasuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier” Pungkasnya.

Selain melakukan pemeliharaan jaringan irigasi tersier pemerintah Desa Klurak juga melaksanakan pemeliharaan Drainase di pemukiman warga dengan pola program padat karya dengan menggunakan alat manual, seperti cangkul dan sekop untuk mengentaskan sendimen yang menyumbat drainase, Sebab setiap musim hujan jalan di sisi drainase ini sering tergenang akibat luapannya karena pendangkalan yang di sebabkan oleh sendimen, Kondisi ini membuat air tidak bisa mengalir dengan lancar, sehingga meluber ke jalan, Padahal jalan ini merupakan akses utama warga, termasuk jalan antar desa. (Nang)

DITERIMA KOMISI A, PERSOALAN TANAH WARGA PRANTI TUNTAS

Sidoarjo, Pojok Kiri

Komisi A DPRD Sidoarjo, Selasa (3/10) menerima rombongan aksi warga Pranti Kecamatan Sedati yang meminta penyelesaian pengurusan sertifikat tanah yang sudah sejak tahun 2015 belum juga tuntas.

Dalam hear ring yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori, hadir Kades Pranti Eko Purnomo, Camat Sedati Dardak, pihak BPN Sidoarjo, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mulyawan serta instansi terkait.

Menurut Kades Eko Purnomo sekitar tahun 2015 ratusan warga Desa Pranti mengajukan permohonan sertifikat tanah secara swadaya total 423 pemohon, namun sekitar tahun 2021 baru sekitar 198 selesai sedang 225 belum selesai, sementara yang 95 pemohon sudah keluar rekomendasi model A.

"Artinya berkas mereka sudah selesai pengukuran



dan peta bidang, tinggal dikeluarkan sertifikat tanahnya," katanya saat hearing.

Namun, yang jadi pertanyaan kata Eko Purnomo, dirinya dan 95 warga yang berkasnya sudah masuk model A dan tinggal nunggu sertifikat tanah jadi, malah disuruh mengajukan ulang

lantaran pejabat BPN Sidoarjo yang menangani sudah pindah. "Sebagai lembaga negara mestinya sistem pelayanan publik tidak terkendala pergantian pejabat, lha kalau begini lantas kapan jadinya pengurusan sertifikat tanah warga, masak ganti pejabat harus diurus ulang,"

katanya.

Mendapat pengakuan Kades Pranti tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori lantas meminta perwakilan BPN Sidoarjo untuk menjawab.

Fitri Hariyadi dan Jayeng dari BPN Sidoarjo yang mengaku baru pindah ke

Sidoarjo kaget dan langsung meminta Kades Pranti dan perwakilan warga untuk datang ke ruangannya guna menyelesaikan sertifikat tanah tersebut.

"Kami akan beri perlakuan khusus untuk warga Pranti agar sertifikat tanah cepat selesai," tegas Jayeng.

Ketua Komisi A dan kades Pranti yang mendengar pernyataan BPN langsung lega karena persoalan yang dikeluhkan warga Pranti sudah ada solusinya.

Ketua komisi A bersama H.Haris wakil ketua komisi A dan H.Samsul Hadi anggota, kemudian menemui ratusan warga Desa Pranti yang menunggu di luar untuk menyampaikan kabar gembira tersebut.

"Kami senang bisa memfasilitasi keluhan warga dan langsung direspon oleh pihak terkait sehingga persoalan sertifikat tanah warga bisa cepat tuntas," tegas H.Haris wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo. (Nang)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Petugas menggeledah dengan cermat setiap celah di kamar tahanan.

Razia Lapas, Temukan Barang Terlarang

Sidoarjo, Memorandum

Tim Satuan Operasional dan Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Lapas Sidoarjo melaksanakan pengeledahan rutin di beberapa kamar hunian, Selasa (3/10) malam. Hasilnya, sejumlah barang terlarang ditemukan dan langsung disita.

Pengeledahan itu memang untuk meminimalisir keberadaan benda-barang terlarang dan berbahaya dalam kamar warga binaan pemasyarakatan (WBP). "Pengeledahan secara rutin memang kami arahkan untuk meminimalisir keberadaan ponsel, narkoba, senjata tajam, dan kabel listrik ilegal yang mungkin ada di dalam lapas/rutan jajarannya," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono, Rabu (4/10).

Langkah ini, lanjut Heni, diperlukan sebagai upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Apalagi menjelang akhir tahun ini eskalasi keaman-

an di lapas rutan akan diperketat. "Biasanya menjelang akhir tahun tingkat kerawanan meningkat, otomatis pengeledahan juga harus lebih digencarkan," urai Heni.

Salah satu lapas yang langsung menindaklanjuti arahan tersebut adalah Lapas IIA Sidoarjo. Pengeledahan dipimpin Kepala Satuan Operasi Patnal Lapas Sidoarjo Tri Wibawa dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Sidoarjo Prayogo Mubarak. "Pada operasi pengeledahan kali ini, kami mengerahkan tim internal saja yaitu dari jajaran staf keamanan dan regu pengamanan, yang terdiri dari 9 anggota," ujar Prayogo.

Operasi pengeledahan yang berlangsung dari pukul 18.00 hingga 19.00 itu, menyasar Blok A Kamar 2, 13, serta Blok B Kamar 4. Aksi tegas ini, lanjut Prayogo, merupakan bagian dari upaya Lapas Sidoarjo untuk menjaga keamanan dan ketertiban di

BARANG DILARANG YANG DITEMUKAN :

- 2 pemotong kuku.
- 5 sendok logam.
- 2 roll kabel ilegal.
- 1 senjata tajam buatan.
- 1 kapi plamir besi.

lingkungannya.

Semua barang-barang hasil razia dan pengeledahan ini selanjutnya diinventarisir dan didata oleh petugas. Rencananya, barang-barang bukti ini akan diamankan untuk proses selanjutnya. "Termasuk pemusnahan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami juga selalu menekankan pendekatan yang manusiawi, agar warga binaan juga tidak merasa tertekan selama pengeledahan," urai Prayogo. (aw/jok/epe)

RISALAH PANGGILAN AANMANING

Nomor : 23 / Eka / 2023 / PN. Sda Jo. 305/Pdt. G/2021/PN. Sda Jo. 912 K/Pdt/2023

Pada hari ini: RABU tanggal 04 Oktober 2023,
Saya MUHAMMAD AMRUN, Jurista Pengadilan Negeri Sidoarjo atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

EDY SUWOKO, Dahulu ber Kantor di Perum Tira Brawijaya Blok Cempaka No 6 Lingkungan Gaplek Rt. 02 Rw. 03 Ds. Bakungan, Giyah-Benyuwangi, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERMOHON EKSEKUSI :

Guna diberikan Teguran/Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar Termohon Eksekusi tersebut dalam waktu 8 (Delapan) hari sejak diberi Teguran/Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, guna memenuhi / melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut kepada Pemohon Eksekusi, antara :

SUHENDRO Sebagai PEMOHON EKSEKUSI ;

Melawan ;

SIPORA YESI MELA Als. YESI IRAWAN, Dkk. Sebagai TERMOHON EKSEKUSI/TURUT TERMOHON EKSEKUSI ;

Adapun Panggilan ini saya jalankan / laksanakan melalui Media Massa / Media Cetak (Koran) dikarenakan alamat yang bersangkutan sudah tidak diketahui alamatnya sekarang. Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya,



MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Peringati HUT ke-73 Humas Polri dengan Berbagi Air Bersih

Sidoarjo, Memorandum

Kemarau panjang tahun ini mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah daerah Jawa Timur. Kondisi itu mengundang kepedulian polisi Sidoarjo untuk turun langsung memberikan bantuan ke masyarakat.

Bantuan air bersih sebanyak 40 ribu liter itu disalurkan Polresta Sidoarjo dalam rangka memperingati HUT ke-72 Humas Polri yang diperingati setiap 30 Oktober. Sasaran wilayah yakni Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro memberangkatkan 5 armada truk bantuan itu dari mapolres, Rabu (4/10). "Program ini juga sebagai implementasi arahan dari Bapak Kapolri, bahwa Polri harus selalu ada dekat dengan masyarakat dan peduli. Maka di tengah musim kemarau berkepanjangan kami turun langsung berikan bantuan air bersih secara serentak pada daerah yang minim ketersediaan air bersih," jelasnya.

Pihaknya berharap melalui bantuan air bersih ini dapat membantu kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat menunjang kesehatan masyarakat dengan adanya air bersih.

Terkait rangkaian HUT Humas Polri yang bertema '*Humas Polri Presisi Untuk Negeri Menuju Indonesia Maju*', Ps Kasihumas Polresta Sidoarjo Iptu Tri Novi Handono menyampaikan kegiatan lebih banyak dalam bentuk sosial kemanusiaan.

"Kami siapkan kegiatan guna semakin mendekatkan Polri bersama masyarakat. Seperti dilaksanakannya donor darah, bantuan air bersih, bakti sosial, gerakan penghijauan dan nantinya juga ada kegiatan bersama rekan-rekan media maupun netizen," sebutnya. (fin/pri/jok/epe)



Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mem-berangkatkan armada truk bantuan air bersih.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Polresta



Sambut HUT Humas Polri Polresta Sidoarjo kota kirim air bersih ke Desa Gempolan Rabu (4/10/23).

Bantu Air Bersih ke Desa

SIDOARJO - Cuaca yang tidak menentu terlebih di musim kemarau yang panjang, mengakibatkan kekeringan dan minimnya ketersediaan air bersih di sejumlah daerah Jawa Timur. Hal ini mengundang kepedulian Polisi Sidoarjo khususnya di HUT Humas Polri, dengan berikan bantuan air bersih ke masyarakat.

Bantuan air bersih sebanyak 40.000 liter disalurkan Polresta Sidoarjo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Humas Polri ke-72 pada 30 Oktober 2023 mendatang. Sasaran wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang membutuhkan bantuan air bersih, yakni Desa Tanggulangin.

Kapolresta Sidoarjo Komisariss Besar Polisi Kusumo Wahyu Bintoro, Rabu (4/10/23) di Mako Polresta Sidoarjo, memberangkatkan langsung bakti sosial air bersih yang dikirimkan menggunakan lima truk tangki menuju Desa Gempolsari dan wilayah sekitarnya.

“Menyambut Hari Jadi Humas Polri ke-72, serta sebagai implementasi arahan dari Bapak Kapolri, bahwa Polri harus selalu ada dekat dengan masyarakat dan peduli. Maka di tengah musim kemarau berkepanjangan kami turun langsung berikan bantuan air bersih secara serentak pada daerah yang minim ketersediaan air bersih,” jelasnya.

Pihaknya berharap melalui bantuan air bersih ini dapat membantu kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat menunjang kesehatan masyarakat dengan adanya air bersih.

Peranan Humas Polri di tengah era kecepatan informasi saat ini, sangat diharapkan mampu mewujudkan kondusifitas kamtibmas. Terutama dengan semakin mendekati agenda Pemilu 2024. Sebab itu, nantinya Humas Polri juga akan berperan aktif mengedukasi masyarakat pentingnya menyerap dan mentransformasi pesan secara transparansi, objektif dan akuntabel.

Terpisah Camat Tanggulangin Sabino Mariano kepada duta.co Rabu (4/10/23), atas nama warga Gempolsari kecamatan Tanggulangin mengucapkan terima kasih atas giat Humas Polri khususnya Polresta Sidoarjo.

“Yang mana memberikan bantuan air bersih untuk warga Gempolsari. Semoga keluarga besar Humas Polri khususnya dan Polri Polresta Sidoarjo pada umumnya selalu selalu sehat dan

Sidoarjo pada...
semangat dalam mengayomi masyarakat, sekali
lagi terima kasih," pungkas Sabino.

Sementara itu terkait rangkaian HUT Hu-
mas Polri ke-72 bertema Humas Polri Presisi
Untuk Negeri Menuju Indonesia Maju, Ps. Kasi
Humas Polresta Sidoarjo Iptu Tri Novi Han-
dono menyampaikan kegiatan lebih banyak
dalam bentuk sosial kemanusiaan.

"Kami siapkan kegiatan guna semakin
mendekatkan Polri bersama masyarakat. Seperti
dilaksanakannya donor darah, bantuan air bersih,
bakti sosial, gerakan penghijauan dan nantinya
juga ada kegiatan bersama rekan-rekan media
maupun netizen," imbuhnya. ● **Loe**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi A Panggil BPN Terkait Sertifikat Tanah 8 Tahun Tidak Selesai

Sidoarjo, Bhirawa

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dhamroni Chudhori, minta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, supaya ada solusi secepatnya, terkait kasus pengurusan sertifikat tanah di desa Pranti, Kecamatan Sedati yang bertahun-tahun tidak ada kepastian.

Sebagaimana diketahui, Selasa (3/10),

kemarin, Komisi A DPRD Sidoarjo telah memimpin rapat hearing, diantaranya diikuti oleh BPN Sidoarjo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Camat Sedati, Pemerintah Desa Pranti, BPD dan perwakilan warga Desa Sedati.

Disampaikan oleh Kepala desa (Kades) Pranti, Eko Pumomo, sampai saat ini masih ada 225 pemohon belum bisa diselesaikan sertifikat tanah massal dari BPN Sidoarjo.

Awalnya pada tahun 2015, ada 423 warga ikut pengurusan sertifikat tanah secara massal di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sidoarjo. Setelah berjalan 6 tahun, yakni pada 2021 lalu, yang sudah selesai ada 198 pemohon.

"225 pemohon belum selesai hingga kini," kata Eko. Namun demikian, dari jumlah itu ada 95 pemohon yang sudah terbit model A dari BPN.

Pasca menjabat Kades, Eko mengaku dirinya juga terus berkomunikasi dengan pihak BPN agar melanjutkan proses pengurusan.

Namun berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak BPN, pengurusan tidak bisa dilanjutkan, lantaran petugas yang menangani sudah pindah tugas. Sehingga kalau mau dilanjut, harus memulainya dari awal. [kus.dre]

HARIAN
Bhirawa

Wala Jajag Bhirawa Sidal



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DELT PUNYA



AHMAD REZA/JAWA POS

ZAMAN BELANDA: Salah satu bangunan lawas di Dusun Kauman, Kedungcangkring, Jabon, kemarin (4/10).

Desa Kedungcangkring, Jadi Sentra Batik di Bangunan Era Belanda

SIDOARJO - Masuk ke Dusun Kauman,

Diperbanyak oleh Subbag Persilang, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Kedungcangkring, Jabon, terlihat banyak sekali bangunan tua era kolonial Belanda. Bahkan,

Dung...
beberapa ada yang tampak tidak terawat. Namun,
ada juga yang digunakan menjadi tempat tinggal.

Menurut pegiat sejarah Sidoarjo Setyo Santoso,
Dusun Kauman, Kedungcangkring, dulunya
wilayah industri kain batik. Dan, salah satu dari
rumah lawas tersebut milik pengusaha batik
pada masa itu. "Kedungcangkring memang sejak
lama terkenal dengan batiknya," ungkapnya.

Setyo mengungkapkan, dari sekian banyak
rumah lawas di kawasan Dusun Kauman,
Kedungcangkring, ada salah satu yang paling
tua. "Ada ukiran huruf Arab dan dibaca
tahunnya 1913," jelasnya. (eza/c17/ai)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Cegah Banjir, Wabup Minta Normalisasi Sungai di Ngingas

SIDOARJO - Sungai yang melintasi tiga desa, yakni Kureksari, Ngingas, dan Sawotratap, kotor. Kondisinya dangkal dan banyak sampah. Rencananya, dalam waktu dekat, saluran tersebut bakal dinormalisasi.

Kemarin (4/10) siang Wakil Bupati Sidoarjo Subandi meninjau langsung sungai tersebut. Subandi ingin normalisasi sungai itu bisa segera dilakukan. Sebab, sungai tersebut terdiri atas dua saluran. Yakni, saluran pembantu dan tersier. Saluran pembantu berfungsi untuk mengalirkan air ke saluran tersier. Saluran tersier berfungsi untuk pembuangan air. "Ini memang butuh dinormalisasi. Kami ingin ini dimaksimalkan sebagai saluran tersier semuanya.



CEK KONDISI: Wakil Bupati Sidoarjo Subandi (tengah) meninjau sungai yang melintasi Desa Ngingas, Kureksari, dan Sawotratap kemarin (4/10).

Artinya, semua untuk saluran pembuangan," katanya.

Dengan begitu, air yang masuk

ke sungai bisa dibuang secara maksimal. "Ini harus segera. Panjangnya sekitar 1 kilometer. Kalau tidak

segera, saya khawatir sungainya akan mati jika tidak segera dinormalisasi," ujarnya.

Sampah harus dibersihkan. Sedimen atau endapan di dasar sungai yang membuat sungai dangkal juga harus segera dikeruk. "Karena ini melintasi tiga desa sekaligus. Untuk kepentingan orang banyak," ucap Subandi.

Selain sungai yang dangkal, pleng-sengan di sisi timur sungai juga keropos. Belum lagi, dalam waktu dekat sudah masuk musim hujan. Khawatirnya, debit air buangan dari perumahan dan kampung di sekitar lokasi tidak cukup ditampung sehingga berpotensi menyebabkan banjir. (uzi/c6/ai)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Progres Perbaikan 38 Sekolah Rusak Capai 70 Persen

SIDOARJO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo tahun ini memperbaiki 38 sekolah yang rusak. Baik TK, SD, maupun SMP. Jika dirata-rata, progres perbaikan puluhan sekolah tersebut saat ini sudah mencapai 70 persen.

Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana-Prasarana Dinas Dikbud Sidoarjo Heri Purwanto menyatakan bahwa perbaikan dimulai pada Juni lalu. "Namun, ada juga yang Agustus, bahkan September. Tapi, kalau dirata-rata, sudah 70 persen progres keseluruhannya," katanya kemarin (4/10).

Namun, ada yang sudah hampir selesai seperti SDN Tambak Sawah, Waru. Di sekolah tersebut, pengecatan sudah tuntas. Tinggal *finishing*. Namun, ada pula yang masih menyelesaikan struktur bangunan seperti di SDN Waru 2. "Masa mulainya memang berbeda, tapi targetnya sama, yakni akhir tahun seluruhnya tuntas," tegasnya.

Di tengah perbaikan sekolah itu, kemarin Dikbud Sidoarjo mengumpulkan operator dari seluruh SMPN di Sidoarjo. Mereka dikenalkan dan dilatih menggunakan aplikasi baru untuk mengidentifikasi kerusakan di setiap sekolah. "Lewat aplikasi tersebut, pihak sekolah bisa melaporkan jenis kerusakannya," ungkapnya.

Pelaporan lewat aplikasi itu dilengkapi foto, perincian kondisi kerusakan,



RUSAK BERAT: Pekerja memperbaiki salah satu kelas SDN Waru 2 yang rusak kemarin (4/10). Pengerjaan diperkirakan tuntas Desember.

dan alamat sekolah. Setelah pelaporan, sistem akan menghitung kerusakan kelas tersebut. "Sistem dalam aplikasi secara otomatis mengidentifikasi bahwa ruang tersebut rusak sangat berat, berat, sedang, atau ringan sekaligus ada perkiraan kebutuhan anggaran perbaikannya," terangnya.

Dengan adanya aplikasi tersebut, data yang terinput bisa lebih cepat.

Petugas tidak perlu datang ke satu per satu sekolah. "Dari data pelaporan yang masuk, muncul sekolah mana saja yang prioritas untuk diperbaiki segera dan yang mana yang bisa ditunda sementara," jelasnya.

Data dari identifikasi aplikasi itu menjadi salah satu dasar pengalokasian anggaran perbaikan sekolah sesuai dengan kondisi riil. Pengem-

bang aplikasi tersebut, Abdul Ghofur, menyatakan bahwa laporan identifikasi itu terekam. "Ada historinya. Karena itu, sekolah diminta melaporkan rutin," katanya. Minimal satu kali pelaporan dalam satu semester. Tujuannya, memudahkan dalam mengetahui kondisi ter-*update* di sekolah. "Jadi, tiap waktu ada *update*-nya," ujarnya. (uzi/c14/ai)

Jawa Pos